



Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Community Participation in Infrastructure Development in Lende Village, Sirenja District, Donggala Regency

Yunus^{1*}, Mahfuzat², Meldi Amijaya³, Nur Afifah⁴, Anisa Nur Rismawati⁵

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

*Corresponding Author: E-mail: yunusi211@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 9 Sept, 2024

Revised: 13 Oct, 2024

Accepted: 23 Oct, 2024

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat;
Pembangunan Infrastruktur;
Desa Lende

Keywords:

Community Participation;
Infrastructure Development;
Lende Village

DOI: [10.56338/jks.v7i10.5810](https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.5810)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa lende. Menurut Adisasmita(2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari 4 orang yang terdiri dari : 1) Kepala Desa. 2). Sekertaris Desa. 3) Ketua BPD. 4) tokoh Masyarakat. Luaran penelitian ditargetkan dalam bentuk membuat jurnal dan dipublikasikan di jurnal online Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan bulan Juli 2024 setelah dana penelitian cair.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze community participation in infrastructure development by looking at the supporting and inhibiting factors in community participation in the implementation of infrastructure development in Lende Village. According to Adisasmita (2006: 34) said that community member participation is the involvement of community members in development, including activities in planning and implementation. The method used is descriptive qualitative. Meanwhile, the data collection technique used in this study is interviews and documentation. Research informants are determined purposively, consisting of 4 people consisting of: 1) Village Head. 2). Village Secretary. 3) Head of BPD. 4) Community leaders. The research output is targeted in the form of making a journal and publishing it in an online journal. The implementation of this research is scheduled for July 2024 after the research funds are disbursed.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting : Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang penting dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa Pada periode awal reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan.

Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dibidang pengelolaan keuangan dan strategi perencanaan pembangunan daerah. Terhadap pemerintah daerah, kebijakan tersebut telah melahirkan dua respon yang berbeda. Pertama, sebagian pemerintah daerah merasa belum siap menerima perubahan paradigma pembangunan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga banyak bupati dan wali kota yang gagap (sock culture) berhadapan dengan pola dan mekanisme pembangunan yang baru termasuk juga kebingungan dalam menggerakkan roda pemerintah. Kedua, justru sebaliknya, banyak bupati dan wali kota karena memiliki kewenangan luas berubah menjadi raja-raja kecil di daerah. Kewenangan tersebut menjadi instrumen kekuatan mengatur daerah berdasarkan “kreatifitas” yang terkadang melampaui batas kewenangannya itu sendiri.

Konsepsi pembangunan berbasis pedesaan merupakan konsep pembangunan yang mampu merangsang masyarakat Desa, sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar dari dinamika sendiri dan dapat bergerak atas dasar potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, suatu pembangunan tidak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Istilah otonom desa tidak digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun kedua ini menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Berangkat dari suatu kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan Bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpuh pada aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat Desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertugas sebagai fasilitator dan motifator, ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tentang Desa tersebut dibuat untuk menggantikan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Desa yang sudah ada sebelumnya. Pasal 23 UU No.6 Tahun 2014 yang juga memberikan penegasan, bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yang dimaksud Pemerintah Desa, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No. 6 Tahun 2014, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Lexi Moleong (2017:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendriyadi, et,al (2019:218) adalah merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial secara alamiah

Lokasi Penelitian

Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang menjadi lokasi penelitian, disebabkan pada tanggal 28 September 2018, Desa Lenda merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sirenja yang berdampak bencana alam berupa gempa dan tsunami. Peristiwa alam tersebut tentu sangat berdampak terhadap capaian pembangunan infrastruktur desa dengan susah payah dibangun dan tentu memerlukan waktu lama tiba-tiba hancur seketika akibat bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018, ada 3 daerah di Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu, Kab Sigi, Dan Donggala yang mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami

Penentuan Informan

Informan penelitian adalah para aparat Desa dan tokoh masyarakat yang dipilih secara purposive, yaitu berjumlah 4 orang antara lain : Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD tokoh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Data dihasilkan dengan cara : Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala- gejala atau fenomena yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam kepada aparat desa, BPD, Tokoh Masyarakat itu sendiri yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (Suyanto dan Sutinah, 2013: 69). Kegiatan wawancara ini terstruktur dan terencana dilakukan ke aparat desa Lende Kecamatan Sirenja Kab Donggala

Teknik Analisis Data

Analisis data dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari informan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan, dikelompokkan atau disusun berdasarkan tipologi dan uraian sebagai inti pembahasan penelitian ini. Proses analisis selanjutnya adalah menginterpretasi data dan informasi, dengan memperhatikan isu yang menjadi objek penelitian. Kemudian mengkategorisasi hasil wawancara dengan informan sebagai suatu pernyataan yang representatif dan obyektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musrenbang di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawara tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap Bulan Januari dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Setiap Desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata Pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum Pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa

Adapun tujuan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) antara lain sebagai berikut:

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan Desa yang akan menjadi bagian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilihan sebagai berikut:
 - 1) Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya Desa/masyarakat. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain
 - 2) Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten /kota atau APBD provinsi;
- b. Menyepakati tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Berdasarkan pendapat Sumadiningrat (1999:69) bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan maka diperlukan suatu strategi perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya tidak lagi diarahkan pada pola *top down* yang bersifat mobilisasi seperti yang selama ini terjadi. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanya *good governance* (Pemerintahan Yang Baik). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumadiningrat di atas, bahwa Musrenbang merupakan sebuah strategi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah tidak lagi melaksanakan pembangunan yang berpola *top down* dengan mobilisasi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang diberikan dalam wadah Musrenbang. Pendapat Sumadiningrat sejalan dengan yang diungkapkan oleh Subari dalam Prasetyo (2006:3) bahwa pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikuti sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*forum and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di

desa. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan. Konsep diatas sesuai dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbang.

Perencanaan pembangunan di daerah melalui Musrenbang dimuali dengan Musrenbang Desa, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut dimulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah Desa dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada dilingkungan mereka. Dengan partisipasi masyarakat dengan Musrenbang Desa, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian tentang partisipasi masyarakat di Desa Balentuma dengan menggunakan Teori Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian tersebut, yaitu:

Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planing Stage*)

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk emberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja. Adapun partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah dengan cara melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, yang merujuk pada dukungan masyarakat (keterlibatan masyarakat) dalam tahap perencanaan kegiatan musrenbang, serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lende, yaitu dengan **Bapak Zulkarnain**, tentang sejauh mana dukungan tokoh-tokoh Masyarakat dan masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan Musrenbang, bahwa Kegiatan Musrenbang yang ada di Desa Lende direspon dengan baik oleh tokoh-tokoh Masyarakat, sangat mendukung penuh rencana pelaksanaan kegiatan musrenbang perencanaan Pembangunan desa karena musrenbang merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran 2024/2025 Ketua BPD, **Bapak Asjan, S.pdi**, bahwa:

Ketua BPD sangat merespon kegiatan Musrenbang ini, tujuan pelaksanaannya untuk menyerap aspirasi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam hal pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Berdasarkan penjelasan kedua informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran serta dan dukungan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Lende sangat baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa.

Adimasita (2006:42) bahwa Partisipasi Masyarakat adalah Pemberdayaan Masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan Perencanaan dan implementasi program/proyek Pembangunan,

dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Pandangan tersebut memberikan makna bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan implementasi program yang didapatkan, dimana di dalamnya ada keterlibatan masyarakat. Namun kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tingkat Musrenbang, yang artinya bahwa masyarakat tidak ikut dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

Bapak ARMIN (Sekretaris Desa Lende)

Tujuan pertama dari Musrenbangdes adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Lende. Melalui partisipasi aktif dan kontribusi dari seluruh warga desa, program-program pembangunan yang direncanakan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, diharapkan bahwa hasil dari Musrenbangdes akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa pada umumnya.

Berbagai macam jawaban yang disampaikan oleh informan diatas, padadasarnya hampir sama, yaitu kurangnya peran serta yang diperlihatkan oleh masyarakat dalam rangka rencana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Balentuma. dengan harapan bahwa apa yang telah disepakati pada saat Musrenbang secara keseluruhan dapat terealisasi untuk kepentingan masyarakat.

Geddesian dalam Soemarno (2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Balentuma. Keterlibatan Masyarakat dapat berupa: 1) *Pendidikan melalui pelatihan*. Pendidikan melalui pelatihan oleh masyarakat Desa Balentuma belum dilakukan secara menyeluruh, Pendidikan mengenai perencanaan Pembangunan hanya diberikan kepada kader tertentu. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas. 2) *partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi*. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Desa Balentuma, hanya sebagian kecil yang melaksanakannya. 3) *partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah*. Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada Pemerintah, meskipun alternatif rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan. Hasil wawancara yang dikemukakan diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lende menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya seperti pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya dengan memberikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan maupun pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Berikut ini berbagai macam usulan warga masyarakat Desa Lende pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, tahun 2024

Tabel 1. Usulan Musrenbang di Desa Lende

NO.	Permasalahan	Usulan kegiatan
1	Kantor Desa perlu direhab akibat pasca gempa bumi 2018	Pembangunan sarana dan prasarana yg belum lengkap, terutama MCK
2	Masih banyak Jalan2 yang belum ada pengerasan/ ditimbun	Peningkatan badan jalan2 desalende
3	Jembatan rusak	Perbaiki jembatan
4	Air meluap ke badan jalan(banjir)	Perbaiki drainase air
5	Perbaiki rumah ibadah	Renovasi rumah ibadah
6	Perbaiki Gedung Posyandu	Renovasi Posyandu
7	Jembatan ke kantong2 produksi pertanian sawah, dan perkebunan	Perbaiki jalan atau jembatan penyebrangan
8	Pembangunan jalan beton	Perbaiki jalan
9	Perlu bantuan nelayan	Bantuan nelayan
10	Penerangan jalan	Pemasangan lampu jalan

Sumber Data Sekunder: Kantor Desa Lende 2024

Berdasarkan penjelasan diatas, menjurut peneliti bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan usulan yang mereka sampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Ketua BPD, Bapak **Asjan Spd.i**, mengatakan bahwa:

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan usulan diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Desa, yang nantinya usulan tersebut yang menjadi prioritas, dan akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu musrenbang tingkat Kecamatan. Jadi sejauh ini saya menilai bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin memberikan saran dan masukannya terkait dengan program yang akan diusulkan. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2024).

Hasil wawancara yang dikemukakan diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Lende telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dan disepakati bersama, seperti melakukan dan memberikan usulan-usulan pada saat Musrenbang karena dari hasil tersebut akan diprioritaskan program-program yang menjadi sangat penting dari Desa.

Berdasarkan uraian dan informasi diatas, Peneliti berasumsi bahwa Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan di Desa Lende menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat kurang aktif. Artinya masyarakat terlibat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dengan aktif

Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan program pembangunan di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam ruang lingkup pemerintah merupakan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat sebagai Warga Negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperluan serta semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Musrenbang pada penelitian ini yaitu keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap Pembangunan. Serta peran masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, uang barang/jasa.

Informasi yang diperoleh peneliti bahwa, jumlah masyarakat yang terlibat pada saat Musrenbang cukup banyak jumlahnya, tidak seperti Musrenbang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan yang disusun, akibatnya berkelanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya dan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritik mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (Desa/Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan dimuali dari Musrenbang Desa/Kelurahan hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak dapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lende, dalam hal tenaga dan materi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk melibatkan diri karena pelaksanaan pembangunan yang dijalankan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dengan program prioritas dari hasil Musrenbang.

Partisipasi di Dalam Pemanfaatan (*utilization stage*)

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evakuasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini

adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan suatu proyek yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Menurut peneliti bahwa, dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penata program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan yang sejalan dengan terekomendasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif

Hasil wawancara yang dikemukakan diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa lende dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa, sikap masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan masih sangat rendah. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur/program hasil pembangunan masih belum menunjukkan sikap yang serius. Ini juga dibuktikan dengan informasi yang diperoleh peneliti dengan sakah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga program pembangunan masih sangat jauh dari harapan

Padaahal untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembangunan maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan, masyarakat setempat harus selalu melibatkan diri dalam berbagai kegiatan pembangunan,, karena merekalah yang mengetahui dengan baik permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, khususnya pembangunan yang ada di wilayah Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan Daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasakut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaanya.

Lebih lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut : 1). Menuju masyarakat yang lebu bertanggung jawab; 2). Meningkatkan proses belajar; 3). Mengiliminir perasaan terasing; 4). Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerinta; 5). Menciptakan kesadaran politik; 6). Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat; 7). Menjadi sumber dari informasi yang berguna; 8). Merupakan komitmen sistem demokrasi

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan pembangunan yang dilihat dari pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan disimpulkan bahwa menunjukkan hasil yang belum maksimal, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan, meskipun hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun adanya sukup yang kurang sadar tersebut akan mwnghambat jalannya proses pembangunan, khususnya di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.





Gambar Dokumentasi kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Lende masih belum maksimal, khususnya pada tahap

Musrenbang. Adapun faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, yaitu usulan-usulan, atau saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat belum terealisasi dengan baik sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak menunjukkan hasil sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Selain itu masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan. Disisi lain, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan harapan masyarakat untuk pemanfaat dan kegunaannya.

SARAN

Diharapkan agar pemerintah dapat merealisasikan seluruh usulan-usulan, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di laksanakan. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara continyu sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada. Diharapkan timbulnya kesadaran untuk menggunakan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan manfaat dan kegunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Anwas, Oos M. 2014.
- Pemberdayaan Masyarakat di Era Global: Alfabeta Bintarto. 1989. *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta:
- Ghalia Indonesia Chandra, Eka dkk. 2003. *Membangun Forum Warga “ Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”*. Yayasan AKATIGA.
- Bandung Hamzens Wildani. 2005. *Perencanaan di Indonesia*. Labdwara: Bogor. Kaho, Josef Rewu. 1998.
- Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta Rineka Cipta.
- Nyoman, I Beratha. 1982. *Desa Masyarakat desa Pembangunan Desa*. Jakarta: halia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang :
- Setara Pers 106 Sugihen, Bahrein. 1997. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung:
- Alfabeta Tsanita, Ayu. 2016. *Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*, dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lampung [Skripsi]: FISIP UNILA.
- Jurnal Mustikawati. 2016. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”.
- E-Journal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, Vol.4, No.2: 2739-2752. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2018.
- Sari, Yuli Kurnia. 2016. “Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Melaksanakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.8 No.1. 2087-0825. Tanggal 13 Maret 2018

- Septyasa, Laksana Nuring. 2013. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".
Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1 No.1. Diakses pada .Tanggal 20 Maret 2018
- Tanuwijaya, Fransiska. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya".
Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.4 No.2. Diakses pada .Tanggal 17 Maret 2018 Sumber Lain Data Monografi Desa Sinarsari Tahun 2016
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 107 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendes Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Website: